

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS MASJID DI PONTIANAK

Oleh: Ismail Ruslan

Penulis adalah Dosen dan Peneliti Pada *Center for Islamic Economic Studies*
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak

ABSTRACT

In reality, the growth of mosques and *surau* (smaller mosques) in the city of Pontianak is fast, like mushrooms in the rainy season. The data from the Ministry of Religious Affairs of Pontianak in 2008 shows that the number of mosques and *surau* was 336 in total. However, the number was not accompanied with activities for economic development of the Muslim society. Similarly, in terms of the number, the majority of people in the city of Pontianak is Muslim, and certainly this has the potential for the empowerment, both in terms of human resources and natural resources (including the Muslim funds). This subject is necessary to be studied by considering: first, the economic conditions of the communities in the city of Pontianak lie under the poverty line and the economic underdevelopment. Therefore, it requires a real effort to improve their economic condition. Second, this article is as an effort to re-actualize the role and functions of mosques as well as the shifting paradigm of the Muslim community in the city of Pontianak regarding the mosque.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Ekonomi, Masyarakat, Masjid

A. Pendahuluan

Problem besar negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia saat ini adalah bertambahnya angka kemiskinan. Angka kemiskinan ini kian meningkat dari tahun ke tahun, bahkan peningkatan angka kemiskinan tersebut semakin menggunung dengan naiknya harga minyak dunia pada tahun 2008 yang berdampak langsung terhadap ekonomi dunia, asia termasuk Indonesia. Diprediksi oleh berbagai pihak bahwa data angka kemiskinan yang berjumlah 19,5 juta jiwa, maka dengan krisis global dunia tahun ini meningkat dua kali lipat menjadi +- 30 juta jiwa. Kelangkaan pangan, karena meningkatnya biaya produksi pangan ditingkat industri maupun pertanian. Menurunnya

daya beli masyarakat, sehingga mutu pangan yang dikonsumsi menjadi rendah. Kemiskinan dapat memunculkan kembali kasus-kasus gizi buruk pada bayi dan balita. Menurunnya derajat kesehatan masyarakat baik fisik maupun psikologis yang dapat meningkatkan kerawanan-kerawanan sosial.

Pada tahun yang sama, krisis global juga terjadi di berbagai negara Amerika Serikat, dan Eropa (Jerman, Prancis dan lainnya) serta Asia termasuk Indonesia. Krisis global ini berdampak terhadap perekonomian dunia, salah satunya adalah rendahnya permintaan pasar karena melemahnya daya beli masyarakat. Akibatnya banyak terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan di berbagai negara. Misalnya Siemen melakukan PHK terhadap 16.750 karyawan dan Pabrik mobil Adam Opel telah menutup 2 pabriknya (Republika, 14 November 2008) dan juga telah terjadi PHK terhadap 200 juta jiwa di dunia. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga terjadi di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat, sebanyak 300 karyawan PT Finnantara Intiga di PHK (Pontianak Post, 16 November 2008). Krisis global ini langsung maupun tidak langsung tentunya berdampak terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, yakni meningkatnya angka kemiskinan.

Beragam pendekatan dikemukakan oleh kalangan ilmuwan untuk mengatasi problem kemiskinan dengan membedah akar kemiskinan tersebut. Pendekatan struktural misalnya menganggap kemiskinan yang terjadi pada masyarakat disebabkan lemahnya sistem yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Disisi lain dikenal juga pendekatan *culture* (budaya) yang menilai bertambahnya angka kemiskinan pada masyarakat disebabkan lemahnya etos kerja masyarakat tersebut. Lebih lanjut pendekatan ini menganggap lemahnya etos kerja bermula pada nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat yang tidak mampu memotivasi mereka untuk maju dalam aspek ekonomi.

Selain kedua teori diatas, banyak juga teori-teori sosial lainnya yang mengupas akar kemiskinan yang tidak disebut disini. Namun dalam analisis pakar ilmu-ilmu sosial menyatakan bahwa terpuruknya kondisi ekonomi bangsa Indonesia dan meningkatnya angka kemiskinan disebabkan oleh gagalnya teori pembangunan yang dirujuk oleh Pemerintah Rezim Orde Baru yakni teori pembangunan (*development*).

Selama beberapa periode kepemimpinan rezim Orde Baru selalu mengedepankan konsep pembangunan (*development*) sebagai jawaban untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tampaknya konsep pembangunan (*development*) yang diusung oleh rezim Orde Baru tidak berjalan mulus bahkan berbagai kalangan menilainya gagal. Kegagalan ini memunculkan konsep-konsep baru dan berlanjut kepada prakteknya dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran bagi masyarakat.

Dalam studi-studi tentang perubahan sosial dikenal istilah "pemberdayaan" (*empowerment*), yang merupakan antitesis dari konsep "pembangunan" (*development*).

Konsep "pembangunan" (*development*) lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang *top down*, elitis, sedangkan "pemberdayaan" lebih bersifat *bottom up*, berbasis kepentingan kongkret masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1). Hadirnya konsep "pemberdayaan" memberikan sesuatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. Selama ini konsep pembangunan yang diusung oleh rezim Orde Baru, masyarakat tidak dilibatkan secara langsung baik dalam hal perencanaan maupun dalam pelaksanaan proses pembangunan tersebut. Hal ini didasarkan pada filosofi pembangunan (*development*) yang selalu mengedepankan prinsip *top down*, dimana negara begitu dominan dalam pembangunan itu sendiri.

Negara-negara tersebut menganut model pembangunan pertumbuhan cepat (*rapid growth development proses*). Walaupun negara berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi model pembangunan ini tidak didukung oleh kemampuan tabungan dan investasi domestik ini sangat rapuh terhadap gejolak perubahan di tingkat global (Faqih, dalam Kusnadi, 2006: 2). Rapuhnya model pembangunan seperti ini nampak jelas ketika Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 (Chambers dalam Agus, 2006). Pemberdayaan (*empowerment*) sebagai sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu bersifat "*people centered participatory, empowering and sustainable*" (Agus, 2006: 140). Pemberdayaan dipandang merupakan konsep ideal karena selalu mengedepankan iklim komunikatif, kondusif, dan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang dan maju secara bersama-sama. Oleh karena itu pemberdayaan bukanlah merupakan upaya pemaksaan kehendak atau proses yang dipaksakan atau kegiatan yang diprakarsai dari pihak luar. Dengan pemberdayaan dapat berpengaruh terhadap terjadinya inisiatif dan respon, sehingga seluruh masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat dan fleksibel (Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry, 2006: 1).

Proses pemberdayaan idealnya juga dapat dilakukan di masjid-masjid, mengingat begitu besarnya aset yang dimiliki masjid salah satunya adalah dana umat yang terkumpul baik dari zakat, infaq dan shadaqah setiap tahunnya serta dana lainnya.

B. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran eksistensialisme, fenomenologi, dan personalisme. Disusul kemudian oleh masuknya gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk di dalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik sekolah Frankfurt. Bermunculan pula konsep-konsep elit, kekuasaan, anti kemapanan, ideologi, pembebasan, dan *civil society* (Pranarka dan Vidhyandika dalam Harry, 2006: 2).

Pada awal gerakan modern, konsep pemberdayaan bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Pada hakikatnya, proses pemberdayaan dapat dipandang sebagai *depowerment* dari sistem kekuasaan yang mutlak-absolut (intelektual, religius, politik, ekonomi dan militer). Konsep ini digantikan oleh sistem baru yang berlandaskan idiil manusia dan kemanusiaan (*humanisme*). Doktrin konsep ini sama dengan aliran fenomenologi, eksistensialisme dan personalisme yang menolak segala bentuk *power* yang bermuara hanya pada proses dehumanisasi eksistensi manusia. Aliran ini bercita-cita untuk dapat menemukan sistem yang sepenuhnya berpihak kepada manusia dan kemanusiaan (Harry, 2006: 4).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat (Clarke, dalam Harry, 2006: 5). Sementara itu pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM, termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (Aziz dalam Kusnadi, 2006: 1).

Dalam konteks ke-Indonesiaan, konsep pemberdayaan (*empowerment*) dianggap merupakan antitesis dari konsep pembangunan (*development*). Konsep pembangunan lebih mencerminkan hadirnya model perencanaan dan implementasi kebijakan yang bersifat *top down*, elitis dan jauh dari nilai-nilai keadilan, sedangkan pemberdayaan lebih bersifat *bottom up* (Kusnadi, 2006: 6), lebih mengedepankan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Sikap aspiratif inilah yang dimaknai sebagai upaya menggali dan menemukan persoalan dari masyarakat sendiri. Artinya, masyarakatlah yang menemukan permasalahannya sendiri dan kemudian memberikan alternatif pemecahan masalah tersebut.

Menurut Kusnadi (2006) bahwa filosofi pemberdayaan pada masyarakat dapat dieksplorasi melalui nilai-nilai yang mendasari hakikat hubungan antara (1) manusia dan Allah Yang Maha Kuasa (2) manusia dengan manusia (3) manusia dengan alam. Ketiga jenis hakikat hubungan vertikal – horizontal ini melahirkan prinsip-prinsip kehidupan sebagai berikut:

Satu, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan jagad raya dengan segala isinya semata-mata untuk kehidupan dan kesejahteraan manusia dunia dan akherat. Pada akhirnya nanti, amanah ini harus dipertanggung jawabkan sepenuhnya oleh manusia di hadapan Sang Pencipta. Prinsip ini akan mendorong pikiran dan sikap manusia untuk menghormati dan menghargai seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, khususnya manusia dan sumber daya alam, serta berhati-hati dalam menjalani kehidupan. Dua, manusia menyadari dan mengakui bahwa sumber daya alam yang ada di lingkungan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara baik dan

bijaksana untuk kesejahteraan sosial dan kelangsungan hidupnya. Prinsip ini melahirkan sikap menjaga kelestarian alam dan memanfaatkannya secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan. Tiga, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak dapat mengatasi sendiri seluruh persoalan kehidupannya tanpa bantuan orang lain. Prinsip ini akan melahirkan sikap untuk bekerja sama, kebersamaan, saling membantu atau gotong-royong dan persatuan. Empat, manusia adalah makhluk berbudaya yang memiliki identitas dan potensi sosial-budaya sebagai basis eksistensinya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai terhadap nilai-nilai budaya, pranata (kelembagaan) sosial, dan pengakuan akan eksistensi suatu masyarakat. Lima, manusia memiliki kehendak dan hak untuk mencapai kualitas kehidupan yang sempurna lahir batin. Prinsip ini akan melahirkan sikap apresiatif terhadap etos kerja, kreativitas, dan aspirasi sosial yang berkembang. Enam, manusia memiliki martabat atau harga diri, otonomi diri, dan kewajiban-kewajiban sosial dalam kehidupannya. Prinsip ini melahirkan sikap menghargai kebebasan sosial yang bertanggung jawab dan konstruktif, mengembangkan ruang demokratisasi dan dialogis, serta menghormati keinginan-keinginan dan cita-cita warga masyarakat. Tujuh, dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan dari negara, baik secara sosial, budaya dan ekonomi maupun politik-kebijakan.

Tujuh prinsip dasar pemberdayaan tersebut memiliki sifat universal sehingga daya dukung dan keberterimaan masyarakat dimanapun mereka berada cukup besar. Norma-norma keagamaan, adat-istiadat, nilai-nilai tradisi, etika sosial masyarakat, dan tata normative kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan ranah yang memungkinkan ketujuh prinsip tersebut dapat diterapkan dengan baik dalam proses pemberdayaan masyarakat (Edi Suhartono, 2005: 59).

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

C. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid

Dalam konteks bahasa, masjid dimaknai sebagai tempat sujud untuk menyembah Allah Yang Maha Kuasa. Makna ini kemudian sering difahami secara tekstual bahwa

masjid hanya untuk aktivitas sujud saja, dan tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas lainnya. Padahal dalam aspek sejarah, beragam aktivitas Nabi Muhammad SAW selalu menjadikan masjid sebagai media, baik dalam bidang ekonomi, politik, dakwah dan lainnya.

Keberadaan Kota Pontianak sebagai pusat perdagangan di Kalimantan Barat diawali dengan berdirinya kota ini pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman (sultan pertama) juga terlebih dahulu membangun surau sebelum membangun pusat pemerintahan. Veth (dalam Hasanudin, 2000) mengatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 1772 di wilayah inilah mereka mulai membuka hutan dan mendirikan pemukiman baru, kemudian mengembangkan sebuah surau (masjid Jami' sekarang) dan beberapa waktu kemudian didirikan sebuah bangunan (Keraton Kadariah sekarang) pada tanggal 23 Oktober 1771 dengan bahan sederhana yang terbuat dari bambu dan daun ilalang. Fakta sejarah ini menunjukkan bahwa Sultan Pontianak ketika mendirikan Kota Pontianak dimulai dengan membangun surau sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat dakwah.

Namun tampaknya, masyarakat Kota Pontianak sudah mulai mengalami perubahan paradigma terhadap fungsi masjid, hal ini terlihat mulai tumbuhnya aktivitas pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di beberapa lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan juga di beberapa masjid sejak tahun 1995 hingga sekarang. Data 2007 mencatat dari 29 Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) / Baitul Maal Wa At Tamwil (BMT) di Kalimantan Barat 7 diantaranya bersifat koordinatif dan berlokasi di masjid. Diantara 29 lembaga itu, 18 diantaranya berkedudukan di Kota Pontianak termasuk 6 BMT juga berkoordinasi dan berada di masjid (Pusat Inkubasi Usaha kecil - PINBUK KALBAR, 2007). Namun secara kuantitatif, jumlah masjid yang melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat tersebut belumlah sebanding dengan jumlah masjid dan surau yang ada di Kota Pontianak, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Rumah Ibadah Menurut Kecamatan
di Kota Pontianak tahun 2008

No	Kecamatan	Rumah Ibadah					
		Masjid	Surau/ Mushalla	Gereja Katholik	Gereja Protestan	Pura	Vihara
1.	Kec. Ptk Selatan	63	97	2	0	0	17
2.	Kec. Ptk Timur	21	20	1	0	0	0
3.	Kec. Ptk Barat	40	57	2	0	0	2

4.	Kec. Ptk Kota	47	81	2	0	0	5
5.	Kec. Ptk Utara	36	81	2	0	0	7
6.	Kec. Ptk Tenggara	-	-	-	-	-	-
	2005	207	336	9	0	0	31
	2004	208	256	23	13	2	26

Sumber: Departemen Agama Kota Pontianak (dikutip dari pemkot.pontianak.go.id)

Data diatas menggambarkan bahwa keberadaan masyarakat muslim di Kota Pontianak memiliki potensi sarana dan prasarana yang begitu besar seperti tersedianya 207 masjid dan 336 surau/mushalla. Tentunya, Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah BMT yang berada di masjid yang ada yakni hanya 6. Jika diprosentase, maka untuk wilayah Kecamatan Pontianak Selatan dari 63 masjid hanya 3 masjid saja yang sudah memiliki BMT, sedangkan Kecamatan Pontianak Barat baru 2 buah dari 21 masjid yang ada, Kecamatan Pontianak Kota hanya 1 masjid yang sudah berdiri BMT. Ketiga kecamatan itu lebih mujur dibanding dua kecamatan lainnya, Pontianak Timur dengan 20 masjid dan Utara 36 masjid belum memiliki BMT.

Namun pemberdayaan ekonomi berbasis masjid memiliki peluang besar, dan merupakan potensi yang mestinya dapat terus dikembangkan dalam konteks pengurangan tingkat kemiskinan di masyarakat Kota Pontianak. Menurut keterangan pengurus PINBUK KALBAR menjelaskan bahwa ada beberapa masjid di Kalimantan Barat yang awal berdirinya bertujuan melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, namun tidak mampu mempertahankan keberadaannya, hingga tidak beroperasi lagi. LKMS / BMT di masjid yang tidak beroperasi lagi diantaranya, Al-Falah di Kabupaten Pontianak, An-Nur di Kabupaten Sintang, Syakirin di Kota Pontianak, Darul Falah di Kota Pontianak serta satu lagi di Kota Singkawang. Alasan lain mengapa masyarakat muslim di Kota Pontianak perlu terus mendorong lahirnya masjid sebagai tempat pemberdayaan ekonomi umat. Secara kuantitas jumlah masyarakat muslim di Kota Pontianak merupakan umat yang mayoritas, dan memiliki angka signifikan.

Dengan tidak menghilangkan peran dan keberadaan 12 LKMS/BMT yang berdiri di luar masjid, mestinya pengelola masjid ikut berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tabel 2
Penduduk Menurut Agama Yang dianut
Kota Pontianak Tahun 2008

No	Kecamatan	Agama					
		Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Kec. Ptk Selatan	60.546	11.854	11.305	119	1.607	15.531
2.	Kec. Ptk Timur	46.656	8.825	10.712	302	1.052	199
3.	Kec. Ptk Barat	158.267	8.372	9.268	623	1.006	571
4.	Kec. Ptk Kota	95.994	3.346	4.653	949	1.091	9.822
5.	Kec. Ptk Utara	50.594	2.587	2.784	431	378	37.367
6.	Kec. Ptk Tenggara	-	-	-	-	-	-
	2005	412.057	34.984	38.722	2.424	5.134	63.490
	2004	321.381	31.975	32.319	4.905	71.581	1.064

Sumber: Departemen Agama Kota Pontianak (dikutip dari pemkot.pontianak.go.id)

Sesungguhnya potensi besar ini sangat disayangkan jika tidak diberdayakan secara maksimal dan diabaikan begitu saja, karena sumber daya manusia ini merupakan modal sosial yang amat berharga.

Persoalannya adalah jumlah masjid dan umat Islam yang potensial dapat dijadikan sebagai kekuatan lokal Kota Pontianak, jika dikelola secara profesional dan proporsional. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi juga mestinya ditanamkan sikap amanah, jujur, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam perjalanan waktu, tumbuh dan berkembangnya lembaga perekonomian umat seperti LKMS / BMT merupakan indikasi telah terjadi perubahan paradigma masyarakat muslim Kota Pontianak dan sudah ada upaya reaktualisasi terhadap fungsi masjid. Artinya, masjid tidak lagi tabu untuk digunakan berbagai aktivitas lainnya termasuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Atas dasar itu, maka keberadaan masjid yang sudah memiliki BMT merupakan potensi yang mestinya terus dikembangkan kearah pemberdayaan, dan penguatan ekonomi masyarakat muslim di Kota Pontianak.

Sedangkan bagi masjid-masjid yang belum melakukan pemberdayaan ekonomi, maka pembinaan hendaknya dilakukan berbagai pihak, misalnya oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) Kalimantan Barat, pengelola masjid yang memiliki BMT dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalangan *stakeholder* di Kota Pontianak serta kalangan perbankan.

Adapun pembinaan yang harus dilakukan pada aspek manajerial, meliputi kemampuan pengelolaan keuangan, perusahaan dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, pembinaan dari sisi keuangan juga merupakan point yang tidak kalah pentingnya, sebab banyak masjid yang memiliki BMT tidak memiliki sisi keuangan yang optimal. Selama ini ”pemilik modal” lembaga masih didominasi oleh orang-perorang yang kemampuannya terbatas, akan lebih baik, jika lembaga keuangan seperti perbankan melakukan hal yang sama.

Jika semua aspek diatas terpenuhi, maka pemberdayaan di masjid akan lebih optimal dan tentunya akan mendorong percepatan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kota Pontianak. Puncak dari itu semua adalah masyarakat akan lebih mandiri, memiliki keterampilan serta akan mampu berwirausaha dengan baik.

D. Penutup

Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid adalah sebuah konsep reaktualisasi peran masjid dari tafsir tekstual masyarakat selama ini. Mengikis habis kemiskinan di masyarakat bukan pekerjaan mudah, tetapi sekecil apapun tawaran untuk turut serta membantu masyarakat bebas dari keterkungkungan kemiskinan merupakan pekerjaan mulia. Jika demikian adanya, maka tulisan ini akan sangat berarti jika saja mampu memberikan warna lain dari konsep pengentasan kemiskinan yang sudah ada selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sikwan. 2006. *Strategi Pemberdayaan Pengungsi Etnik Madura Asal Sambas di Kota Pontianak Kalimantan Barat* dalam Borneo-Kalimantan 2006: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan / Bandar Borneo Kalimantan, Institut Pengajian Asia Timur Universiti Malaysia Sarawak Kota Samarahan, Sarawak.
- Edi Sugarto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Refika Aditama, Bandung.

- Kusnadi. 2006, *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Penerbit Humaniora, Bandung.
- Harry Hikmah. 2006, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama, Bandung.
- Hasanudin, Hendata Suta Purwana, (2002), *Pontianak 1771 – 1900, Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi*, Romeo Grafika, Pontianak
- Ismail Ruslan. 2004. *Enterpreneurship Etnik Melayu di Kota Pontianak*, Penelitian STAIN Pontianak: STAIN Pontianak
- Ismail Ruslan. 2005. *Etos Kerja Orang Tionghoa di Kota Pontianak*, Laporan Penelitian STAIN Pontianak: STAIN Pontianak
- Ismail Ruslan. 2006. *Belajar Dari Semangat Kerja Etnik Tionghoa dalam Borneo-Kalimantan 2006: Transformasi Sosial Masyarakat Perkotaan/Bandar Borneo Kalimantan*, Institut Pengajian Asia Timur Universitas Malaysia Serawak.
- Ismail Ruslan. *Cerita Dari Tanah Merah Ketapang: Perempuan Pemecah Batu*, Borneo Tribun 30 Mei 2007
- Ismail Ruslan. *Dilema Ekonomi Masyarakat Kota Pontianak*, Borneo Tribun 22 September 2007
- Ismail Ruslan, 2007, *Sosio Ekonomi Masyarakat Iban di Kalimantan Barat* dalam Chong Shin dkk (ed), *Kelompok Ibanik di Kalimantan Barat*, STAIN Pontianak Press.
- Ismail Ruslan, 2007, *Sosio Ekonomi Masyarakat Gunung* dalam Yusriadi dan Fahmi Ichwani (ed), *Dayak Islam di Kalimantan Barat*, STAIN Pontianak Press.
- Ismail Ruslan, 2008, *Bahasa Melayu Dalam Sosio Ekonomi Orang Melayu di Kota Pontianak* (makalah) disampaikan dalam Seminar Antar Bangsa Dialek-Dialek Austronesia di Nusantara III di Brunai Darussalam 24-26 Januari 2008.
- Syarifah Asmiati, 2005, *Etos Kerja Perempuan Madura di Pasar Kampung Dalam Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak*, (tesis) Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Syarifah Asmiati, Borneo Tribun, 16 November 2008
- Syarifah Asmiati, Republika, 14 November 2008